

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chidir. 1987. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Casella, Stefan D., 2007, *Asset Forfeiture Law in the United States*, Juris Net, LLC, 71 New Street, Huntington, New York 11743.
- Garnasih, Yenti, 2010, *Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil korupsi, dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume. 7 Nomor. 4.
- Greenberg, Theodore S., 2010, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.
- Hamzah ,Andi. 2008. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1993. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Arikha Media Cipta. Jakarta.
- Hannekam , J. G. A. 2002. *Common Roots and Separate Development*. Universiteit van Leiden. Leiden.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Hukum Pidana Dalam Perspektif: Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pustaka Larasan. Denpasar.
- Jauhari, Abdul Muis, 2016, *Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*, Institutional Repositories & Scientific Journals, Universitas Pasundan.
- Jaya, N. S. P. 2008. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Muladi, Diah Sulistyani R. S. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. PT Alumni. Bandung.
- Muladi, et al. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Muladi. 1989. *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korporasi*. Makalah. Seminar Nasional Korporasi. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan; Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Ghalia. Bogor.
- Nasution, Bismar, 2009, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Books Terrace & Libray, Bandung,
- Ramelan. 2007. *Kapita Selekta Tinda Pidana Korupsi: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Balitbang Kumdil Mahkamah Agung RI. Jakarta.



- Ramelan. 2012. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Remmeling, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Setiyono, H. 2005. *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Stone, Jon R. Stone. 2005. *Dictionary of Latin Quotations: The Illiterate's Guide to Latin Maxims, Mottoes, Proverbs, and Sayings*. Routledge Taylor and Francis Group. New York.
- Subekti. 1977. *Hukum Acara perdata*. Bina Cipta. Jakarta.
- Vos, H.B. 1950. *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.-Haarlem. Haarlem. Kerajaan Belanda.
- Widyopramono, 2014, *Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini”, Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yanuar, P, 2015, *Pengembalian aset hasil korupsi*, PT Alumni, Bandung.
- Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Zulfa, A, 2011, *Paradigma pergeseran pemidanaan*, CV Lubuk Agung, Bandung.

Artikel Jurnal

- A, Stephen, *The Structure of Unjust Enrichment Law: Is Restitution a Right or a Remedy*, Loyola of Los Angeles Law Review, hlm. 36, 2003.
- Akbar, Muhammad Fatahillah Akbar, , *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No. 3, 2021.
- Alatas, Syed Husein, “*Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*”, LP3ES, Jakarta, 1983



- Alhakim, Abdurrahman, Eko Soponyono, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Jurnal PPembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, No. 3, 2019.
- B.N, Arief,, “Pembaruan penegakan hukum dengan nilai-nilai moral religius. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menembus Kebuntuan Legal Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH Undip, Semarang, 2009.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, , Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Badjuri, Achmad,, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Volume. 18 No. 1, hlm. 90, 2011.
- Barnet, Tood, Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act, *Duquesne Law Review* Fall, hlm. 89, 2001.
- Danil, Elwi, “Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya”, *PT Raja Grafindo Persada*, 2014.
- Elkins, James R, “Corporations and the Criminal Law: An Uneasy Alliance”, *Kentucky Law Journal*, Volume 65 Nomor 1, 1976.
- Gilford, Paula, “Forfeiting the proceeds of corruption, A seminar on Asset Forfeiture and Money Laundering for Member States of the Organization of American States”, 2006
- Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, 2009, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The World Bank & UNODC, Washington D.C.
- Hiariej, Eddy O.S, “Pengembalian Aset Kejahatan, Jurnal Opinio Juris”, Volume 13, 2013.
- Hiariej, Edward O.S, “United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 31 Nomor 1, Februari 2019.
- Jaya , Arizon Mega, *Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi* , Jurnal Cepalo, Volume 2 Nomor. 2, hlm. 52-53, 2018.
- Khanna, V. S, “Corporate Criminal Liability: What Purpose Does it Serve?”, *Harvard Law Review*, Volume 109 Nomor 7, 1996.
- M, Hurd, Heidi, ,*Unjust Enrichment: A Study of Private Law and Public Values*, Cambridge University Press, New York, 2003.
- Madril, Oce, *et al*, “Menjerat Korupsi Korporasi”, PUKAT UGM, edisi ke 1, Yogyakarta.
- Mahmud, Ade, Problematika Asset recovery dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, *Jurnal Yudisial* Vol. 11, 2018.
- Mezak , M.H, “Jenis, Metode & Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Law Review*, Volume 3, 2016.



- Munzil, F, *Kesebandingan pidana uang pengganti & pengganti pidana uang pengganti dalam rangka melindungi hak ekonomi negara*, Jurnal Ius Quia Iustum, Volume. 22 Nomor. 1, 2015.
- Padil, “Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Volume IV No.1, 2016.
- Pakpahan, Rudy Hendra, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume. 16 Nomor. 3, hlm. 374, 2019.
- Prakarsa, Aliytha dan Rena Yulia, Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum PRIORIS, Volume. 6 Nomor. 1, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, “Membedah Hukum Progresif”, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Ranawidjaja, Usep, Research Center (URRC) Aby Maulana, “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada Jalur Khusus Menurut RUU KUHP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Dibeberapa Negara”, Jurnal Hukum Staatsrechts Volume 1 Nomer 1, Oktober 2014.
- Rifai, Eddy, “Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Mimbar Hukum, Volume 26 Nomor 1.
- Romansah, Fauzul, *Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Poenale, Volume. 5 Nomor. 4, 2017.
- Romantz, David Scott, “Civil Forfeiture And The Constitution: A Legislative Abrogation of Right And The Judicial Response: The Guilt of The Res”, 28 Suffolk University law Review, hlm. 390, 1994.
- Rony Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK)”, Jurnal Cita Hukum, Volume II No. 2, 2015.
- Smith, Stephen A, “Restatement of the Law, Restitution and Unjust Enrichment: Tentative Draft”, American Law Institute; Smith, , Loyola of Los Angeles Law Review, hlm. 36, 2003.
- Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume V nomor 1, 2017.
- Sudirman, Lu dan Feronica, “Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi di Indonesia dan Singapura”, Mimbar Hukum, Volume 23 Nomor 2, Juni 2011.
- Sujatmiko, Wawan Heru, “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia”, Integritas; Jurnal Antikorupsi, Volume 7 Nomor 1, 2020.
- Sukarno, “Penerapan Perampasan Aset di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara”, Indonesia Treasury Review Volume. 3 Nomor. 4, hlm. 301, 2018.



Syamsudin, M, “Rekonstruksi pola pikir hakim dalam memutuskan perkara korupsi berbasis hukum progresif” *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor. 1, hlm. 173, 2011.

Syarif, Laode M, “Tanggung Jawab Pidana Korporasi.”

Toule , Elsa R. M., 2013, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume. 3 No. 3.

Weissmann , Andrew dan David Newman, “Rethinking Criminal Corporate Liability”, *Indiana Law Journal*, Volume 82 Nomor 2, Maret 2007.

Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

Ariyani, Naili, 2020, *Prospek Penerapan Konsep plea Bargaining dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Haswandi. 2017, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Disertasi, Program Doktor FH Universitas Andalas.

Nurul Istiqomah, 2009, *Tinjauan Kriminologi*, Fisip UI, Jakarta.

Sadeli, Wahyudi Hafiludin, 2010, *Tesis Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sitompoe, Hotma PD. 2016, *Pelaksanaan Asset Recovery dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata Indonesia*, Disertasi, Program Doktor FH UGM, Yogyakarta.

Webb, Philippa, Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta..

Artikel

Anti-Corruption Clearing House, *Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris dan Prancis*, <https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/48-riset-publik/815-lingkup-tindak-pidana-korupsi-dan-pembuktian-kesalahan-dalam-sistem-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-di-indonesia-inggris-dan-prancis> Diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

Anti-Corruption Forum, *Peran KPK Dalam Indonesia Anti-Corruption Forum*, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/142-peran-kpk-dalam-indonesia-anti-corruption-forum> diakses pada 16 Mei 2022

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Kerugian Negara Kasus Century Rp.689,39 M Dan Rp.6,76 T*, <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-centuryrp68939-m-dan-rp676-t> diakses pada tanggal 23 Juni 2022.



- Bilal Ramadhan, *Kronologis Kasus Bank Century*, <https://www.republika.co.id/berita/n20q0m/ini-kronologis-kasus-bank-century> diakses pada tanggal 23 Juli 2022
- Dylan A. Rachman, “ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi pada 2018 Capai 9,29 triliun” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all>, diakses pada 10 Agustus 2021.
- Guritno, Tatang, “Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun” Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.
- Halim, Devina, *BPK: Kerugian Negara Dalam Kasus Jiwasraya Mencapai Rp. 16,81 Triliun*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/15334091/bpk-kerugian-negara-dalamkasus-jiwasraya-mencapai-rp-1681-triliun> diakses pada tanggal 16 Juli 2022.
- Idris, Muhammad, *Skandal Korupsi di Garuda dari Masa ke Masa*, <https://money.kompas.com/read/2022/04/24/060700626/skandal-korupsi-di-garuda-dari-masa-ke-masa?page=all>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.
- International Centre for Asset Recovery, 2012, *Non-Conviction Based (NCB) Forfeiture*, <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081ed-785>, diakses tanggal 12 Mei 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Graph TPK berdasarkan Profesi/ Jabatan”. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi Inkracht”, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht>, diiakses pada tanggal 16 Januari 2022.
- Mochtar, Zainal Arifin, “Membaca Anjlok IPK Indonesia”, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/381416/membaca-anjlok-ipk-indonesia>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, “United Nations Conventions Against Corruption” https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf. Diakses pada tanggal 16 Januari 2021.
- Puteri, Alfi Salima, *Total Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Garuda Capai Rp8,8 Triliun*, <https://www.dream.co.id/dinar/fantastis-total-kerugian-negara-akibat-kasus-korupsi-garuda-capai-rp88-triliun-220622f.html>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.
- Rezkisari, Indira, Baru 0,1 Persen Kerugian Jiwasraya yang Kembali ke Negara, <https://www.republika.co.id/berita/r3wexk328/baru-01-persen-kerugian-jiwasraya-yang-kembali-ke-negara> diakses pada tanggal 22 Juli 2022.
- Rima Gravianty Baskoro, *Mutual Legal Assistance dan Re- Litigasi sebagai Upaya Pengembakuan Asset di Luar Negri Hasil TPPU di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/rimagraviantybaskoro6257/624d2cc6bb448660eb7dc8c2/mutual-legal-assistance-dan-re-litigasi-sebagai-upaya->



[pengembalian-aset-di-luar-negeri-hasil-tppu-di-indonesia](#) diakses pada tanggal 23 Juli 2022.

Saputra, Refki, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, Anti-Corruption Clearing House, <https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/48-ri-set-publik/818-tantangan-penerapan-perampasan-aset-tanpa-tuntutan-pidana-non-conviction-based-asset-forfeiture-dalam-ruu-perampasan-aset-di-indonesia>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

Suyatmiko, Wawan, Allvin Nicola, “Indeks Persepsi Korupsi 2020; Korupsi, Respon Covid-19 dan Kemunduran demokrasi”, Transparency International, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

World Bank, 2011, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery*, http://www1.worldbank.org/finance/star_site/documents/nonconviction/part_a_03.pdf, diakses tanggal 12 April 2022

Yanurisa Ananta, Seluruh asset Bank Century masuk kantong LPS, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190206160906-17-54101/seluruh-aset-bank-century-di-luar-negeri-masuk-kantong-lps> diakses pada tanggal 23 Juli 2022.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2058)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. September 2019

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2015.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Agreement Between The Government of The*



Republic of Indonesia and The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China Concerning Mutual Legal Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. perihal perkara pidana pada peradilan tingkat pertama atas nama terdakwa PT Giri Jaladhi Wana, 9 Juni 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN/Bdg. perihal perkara pidana pada peradilan tingkat pertama atas nama terdakwa PT Cakrawala Nusadimensi, 19 Oktober 2016,

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl perihal perkara pidana pada peradilan tingkat pertama atas nama terdakwa PT Lian Suasa, 2 Mei 2019.